

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA
BERINGIN INDAH KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN**

PELALAWAN TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MELINDA IRVIANI

177310265

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : MELINDA IRVIANI
Npm : 177310265
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Turut Menyetujui :
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Andriyus, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : MELINDA IRVIANI
Npm : 177310265
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Ketua

Sekretaris

Andriyus, S.Sos., M.Si

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Anggota

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MELINDA IRVIANI
Npm : 177310265
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di
Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Ketua

Sekretaris

Andriyus, S.Sos., M.Si

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 “**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terimakasih untuk semua informan dan masyarakat lansia penerima bantuan PKH di Desa Beringin Indah yang telah bersedia memberi informasi dan kerjasamanya.

7. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Ayahanda tercinta Alm. Sofyan, dan Ibunda tercinta Ermayana, saudara penulis yaitu abang pertama Jefriandi, kakak Tika Aryani, dan abang kedua Ilham Syahputra, kakak ipar dan abang ipar yang selalu memberikan nasihat, restu dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil kepada penulis. Juga kepada keponakan-keponakan penulis yang sudah memberikan semangat.
8. Teristimewa juga kepada sahabat seperjuangan penulis Shindy Neffitasari yang selalu membantu, memberi semangat, dan selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada teman-teman yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis Elsa Ade Lina, Siti Akodiah.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi menyempurnakannya.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, 23 Maret 2022

Penulis

Melinda Irviani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN 21	21
A. Studi Kepustakaan	21
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	21
2. Konsep Pemerintahan	23
3. Konsep Pemerintahan Daerah.....	24
4. Konsep Kebijakan.....	27
5. Konsep Kebijakan Publik	28
6. Konsep Implementasi Kebijakan	29
7. Konsep Kesejahteraan Sosial.....	36
8. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH).....	37
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Pikiran	41
D. Konsep Operasional.....	42
E. Operasional Variabel	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan dan Key Informan	46
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisa Data	50
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	50
I. Rencana Sistematika laporan Penelitian	52

BAB IV	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	53
	A. Gambaran Umum Desa Beringin Indah	53
	1. Sejarah Singkat Desa Beringin Indah	53
	2. Keadaan Geografis Desa Beringin Indah	54
	3. Keadaan Penduduk Desa Beringin Indah.....	55
	4. Mata Pencaharian penduduk Desa Beringin Indah	56
	5. Luas Pertanian Desa Beringin Indah	57
	6. Tingkat Pendidikan penduduk Desa Beringin Indah ...	58
	B. Pemerintahan Desa Beringin Indah	59
	1. Aparat Desa Beringin Indah.....	59
	2. Struktur Pemerintahan Desa Beringin Indah	60
	3. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Beringin Indah.....	61
	4. Uraian Tugas, pokok, dan Fungsi Pemerintahan Desa Beringin Indah.....	63
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
	A. Identitas Informan.....	68
	1. Usia Informan.....	68
	2. Jenis Kelamin Informan	71
	3. Tingkat Pendidikan Informan	72
	B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.....	73
	1. Komunikasi	74
	2. Sumber Daya	79
	3. Disposisi.....	84
	4. Struktur Birokrasi.....	89
	C. Hambatan.....	93
BAB VI	PENUTUP	95
	A. Kesimpulan.....	95
	B. Saran	95
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Kriteria Penerima Bantuan PKH	3
I.2 : Daftar Indeks dan Komponen PKH	4
I.3 : Daftar Jumlah KPM PKH	14
I.4 : Daftar Nama Nama Masyarakat Lansia Miskin di Desa Beringin Indah.....	16
I.5 : Daftar Nama KPM PKH Lansia di Desa Beringin Indah	17
II.1 : Konsep Operasional Variabel	43
III.1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	51
IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
IV.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	56
IV.3 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Beringin Indah.....	57
IV.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Beringin Indah	58
IV.5 : Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Beringin Indah	58
IV.6 : Jumlah Perangkat Desa Beringin Indah.....	59
V.1 : Identitas Informan	69
V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Usia	70
V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
V.4 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.I : Alur Pelaksanaan PKH.....	9
II.I : Model Implementasi Gerge Edward III	41
IV.1: Struktur Organisasi Desa Beringin Indah.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar wawancara Penelitian.....	101
2. Dokumentasi Penelitian.....	113



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELINDA IRVIANI
Npm : 177310265
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Maret 2022
Pelaku Pernyataan,

Melinda Irviani

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

ABSTRAK

Oleh :

Melinda Irviani

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya kesadaran peserta PKH lansia yang menyebabkan tidak sempurna nya proses penyelenggaraan Program PKH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi/pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. Teknik penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*, yang berjumlah 7 orang yang terdiri dari key informan dan informan. Hasil penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 secara keseluruhan sudah cukup terlaksana baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator implementasi dalam penelitian yang ditinjau dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksana PKH di Desa Beringin Indah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai SOP yang ada. Masyarakat juga sudah melaksanakan kewajibannya. Namun, masih ada sebagian dari peserta PKH itu sendiri yang tidak melakukan kewajiban mereka sebagai peserta PKH, hal ini tentunya tidak sesuai dengan kewajiban peserta dalam PKH. Kurangnya pemahaman peserta lansia mengenai apa yang disampaikan oleh pendamping juga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan PKH di Desa Beringin Indah.

Kata kunci : Program Keluarga Harapan, Implementasi, peserta PKH, Desa Beringin Indah.

Implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Beringin Indah Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency in 2020

ABSTRACT

By

Melinda Irviani

This research is motivated by the lack of awareness of elderly PKH participants which causes the process of implementing the PKH Program to be imperfect. The purpose of this study is to describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Beringin Indah Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency in 2020. This study uses qualitative methods to describe the actual situation or what actually happened in the implementation of the Family Hope Program (PKH). in Beringin Indah Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency in 2020. The technique of withdrawing informants in this study used the snowball technique, which consisted of 7 people consisting of key informants and informants. The results of the research on the Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Beringin Indah Village, Pangkalan Kuras, Pelalawan Regency in 2020 have been carried out quite well. This can be seen in the implementation indicators in the research in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. PKH implementers in Beringin Indah Village have done their job well and according to existing SOPs. The community has also fulfilled its obligations. However, there are still some PKH participants themselves who do not carry out their obligations as PKH participants, this is certainly not in accordance with the obligations of participants in PKH. The lack of understanding of the elderly participants regarding what was conveyed by the facilitator also led to the less than optimal implementation of PKH in Beringin Indah Village.

Keyword : Family Hope Program (PKH), Implementation, PKH Participant, Desa Beringin Indah Village.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di Indonesia yang tidak ada habisnya dan sulit diatasi dari waktu ke waktu. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut BPS tahun 2016, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang pasti dialami oleh negara berkembang, salah satunya adalah Negara Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan dan memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Namun nampaknya permasalahan tersebut tidak kunjung terselesaikan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat terutama di daerah terpencil yang belum sejahtera kehidupannya.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini, program-program yang dilaksanakan belum mampu memberikan pengaruh yang berarti, sehingga tujuan pembangunan nasional saat ini terkait masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih belum terselesaikan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus untuk penanggulangan kemiskinan. Salah satu

kebijakan sosial yang dikembangkan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program tunai bersyarat yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2007. Program ini bukan merupakan lanjutan dari program bantuan langsung (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah program yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial, dibantu oleh Dinas Sosial di Kabupaten/Kota/Provinsi serta Pendamping PKH di setiap Desa/Kecamatan.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program Keluarga Harapan untuk keluarga miskin merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan kepada keluarga miskin melalui bantuan keluarga harapan berupa uang tunai dengan jumlah tertentu.

Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah yang bersumber dari APBN, dikelola oleh Kementerian Sosial RI dan dibantu oleh Dinas Sosial di Kabupaten/Kota/Provinsi serta pendamping PKH di setiap desa/kecamatan.

Tabel 1.1
Kriteria Penerima PKH.

No	Komponen	Kriteria
1	Kesehatan	hamil/menyusui Anak berusia 0 sampai 6 tahun
2	Pendidikan	Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah atau sederajat Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat Anak berusia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3	Kesejahteraan Sosial	Lanjut usia mulai dari 60 tahun (mulai tahun 2020 diubah menjadi 70) Penyandang disabilitas diutamakan disabilitas berat.

Sumber : Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018

Penyaluran bantuan diberikan terhadap KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Penyaluran bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

Nilai bantuan merujuk pada Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks komponen Bantuan Program Keluarga Harapan.

Tabel 1.2
Indeks dan Komponen PKH

No	Skenario Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Ibu Hamil	3.000.000
2	Anak usia Dini	3.000.000
3	SD	900.000
4	SMP	1.500.000
5	SMA	2.000.000.
6	Disabilitas	2.400.000
7	Lanjut Usia	2.400.000

Sumber pedoman umum PKH 2019

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu, Kategori Fakir Miskin dan Kurang mampu dibagi menjadi 2, yaitu :

- a Fakir Miskin dan Orang Kurang mampu yang teregister
 1. Tidak mempunyai sumber pencaharian dan/atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
 2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
 3. Tidak mampu atau kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah.

4. Tidak mampu membeli pakaian, satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah.
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok/ dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil/ kurang dari 8 meter persegi/orang.
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air/sungai/air hujan/lainnya.

b Fakir miskin dan Orang Kurang mampu belum teregister :

1. Gelandangan
2. Pengemis
3. Perseorangan dari komunitas adat terpencil
4. Perempuan Rawan sosial Ekonomi
5. Korban Tindak Kekerasan
6. Pekerja Migran Bermasalah Sosial

7. Masyarakat kurang mampu akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai 1 tahun kejadian bencana
8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial
9. Penghuni Rumah Tahanan/ Lembaga Perumahan
10. Penderita Thalassaemia Mayor
11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI)

Sedangkan syarat penerima bantuan PKH kriteria lansia menurut Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial yaitu :

1. Beusia 70 tahun keatas
2. Maksimal memiliki 1 komponen lansia dalam satu keluarga
3. Berasal dari keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai peserta di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

PKH dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH Kabupaten / Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH. UPPKH Pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta menyediakan bantuan yang dibutuhkan. UPPKH Kab/Kota, melaksanakan program dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kab/Kota juga berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta memberi bantuan jika diperlukan. Pendamping merupakan pihak kunci yang menjembatani

penerima manfaat dengan pihak - pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas Pendamping termasuk didalamnya melakukan sosialisasi pengawasan dan mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya. (Hidayat 2018)

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. Selain tim ini, juga terdapat lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan Bappeda di tiap kabupaten kemudian kecamatan dimana PKH dilaksanakan

Dalam buku pedoman Program Keluarga Harapan 2016, dijelaskan Program Keluarga Harapan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa income effect kepada RTSM melalui pengurangan beban ekonomi dalam hal pengeluaran rumah tangga serta dalam jangka panjang program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari

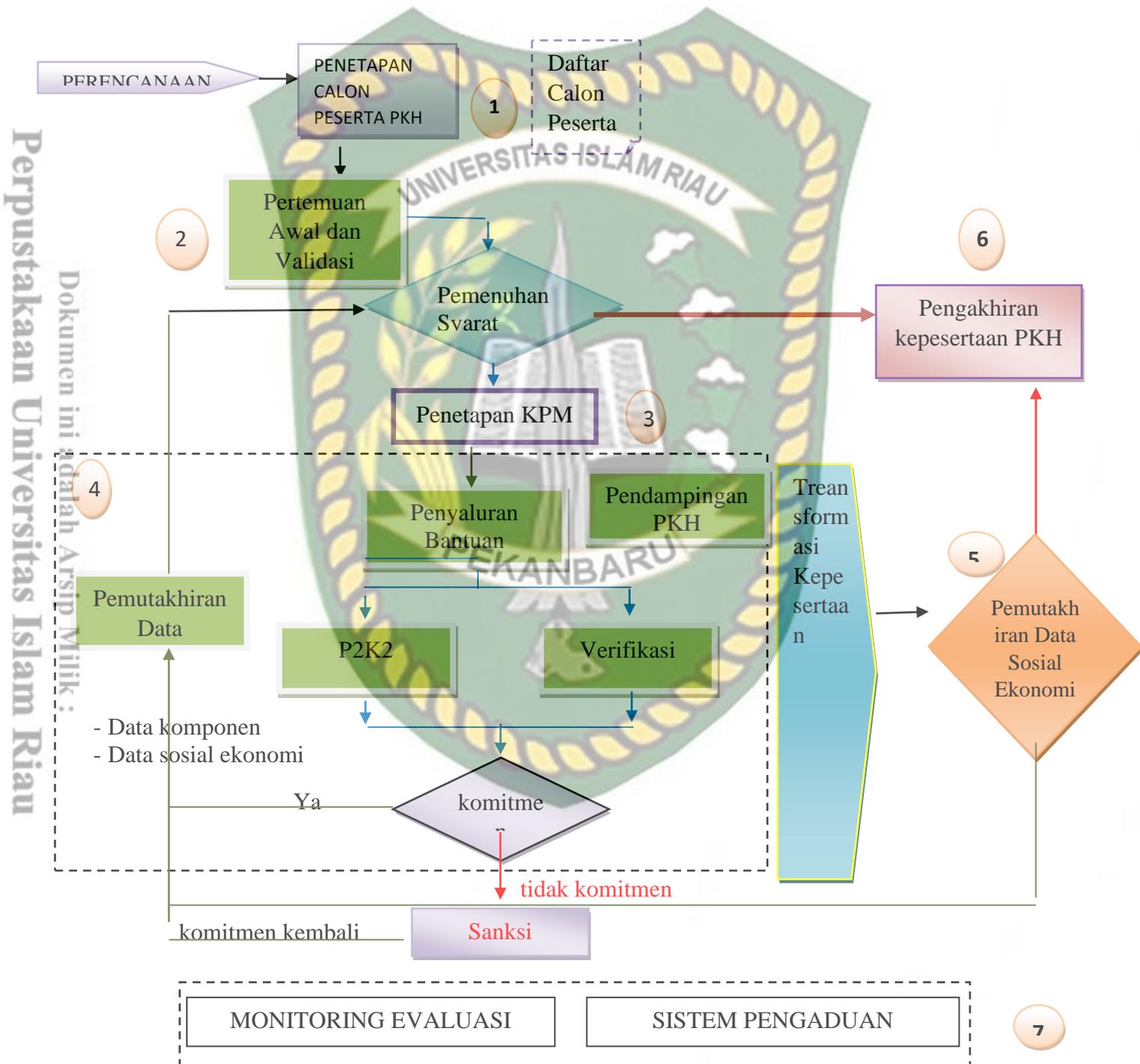
kelompok paling miskin. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2, tujuan Program Keluarga Harapan adalah :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sedangkan sasaran Program Keluarga Harapan berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Berikut alur pelaksanaan Program Keluarga Harapan :

Alur pelaksanaan PKH dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020. Proses utama pelaksanaan PKH dapat dilihat pada gambar berikut



Keterangan alur Pelaksanaan PKH :

1. Pelaksanaan program ini dimulai dengan pengumpulan data target peserta program, melakukan sosialisasi seperti pertemuan awal dengan peserta dan melakukan validasi,
2. Selanjutnya pemenuhan syarat-syarat peserta manfaat, setelah memenuhi semua syarat maka otomatis sudah menjadi peserta penerima manfaat,
3. Setelah menjadi peserta penerima manfaat maka selanjutnya peserta menerima dana bantuan PKH. Penyaluran bantuan ini diberikan dalam bentuk uang kepada peserta. Penyaluran bantuan ini pada awalnya diberikan secara tunai, namun sejak tahun 2016 beralih menjadi non tunai. Bantuan dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau dengan pembukaan rekening.
4. Selanjutnya peserta mendapatkan layanan berupa pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Hal ini bertujuan untuk memastikan tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.
5. Selanjutnya mengadakan pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga untuk melihat perubahan perilaku peserta. Tujuannya agar peserta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai anggota penerima manfaat PKH.
6. Kemudian untuk pemenuhan kewajiban peserta penerima manfaat, dilakukan verifikasi komitmen. Pelaksanaan Program keluarga Harapan harus memastikan seluruh peserta Penerima manfaat yang terdaftar hadir dan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

7. Dan selanjutnya adalah melakukan pemutakhiran data, yang tujuannya adalah untuk melihat kondisi terkini peserta penerima manfaat.

Alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerjasama dengan Subdit terkait lainnya. Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 40 yaitu :

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera
- d. Proses penyaluran bantuan sosial PKH
- e. Penarikan dana bantuan sosial PKH
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH.

Indonesia merupakan bagian dari negara kesejahteraan. Maka segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya, serta memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan atau lanjut usia sehingga dapat mempertahankan kesejahteraan sosial bagi warga lanjut usia. Dalam buku pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2020, penuaan penduduk telah berlangsung secara pesat di Indonesia. Pada tahun 2018 mencatat jumlah lansia di Indonesia adalah 24,49 juta jiwa, yang menandakan bahwa Indonesia termasuk negara yang memasuki era penduduk menua (ageing population). Permasalahan yang dihadapi lansia bukan hanya mengenai perubahan fisik, mental, sosial dan psikologi serta

ekonomi, namun juga disebabkan dalam memperoleh akses layanan fasilitas ekonomi dan sosial, serta dalam pengisian waktu luang. Hal ini dapat menurunkan kemampuan dan umur harapan hidup manusia Indonesia lanjut usia.

Memasuki usia senja, lanjut usia memerlukan dukungan berupa dukungan sosial dan ekonomi. Selama tahun 2020, rumah tangga yang masih tercatat/menjadi penerima PKH yaitu sebesar 11,13 persen dengan persentase penerima PKH dipedesaan lebih besar daripada di perkotaan (14,48 persen berbanding 8,18 persen) (Menurut BPS Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020).

Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, lansia memperoleh perhatian pemerintah melalui Program Keluarga Harapan. Pada kategori kesejahteraan sosial yaitu komponen lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, baru dilaksanakan pada tahun 2016, yang mana Keluarga Penerima Manfaat berkewajiban untuk mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia 70 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat dan masuk kategori tidak mampu, dengan ketentuan harus :

1. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit satu kali dalam satu tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia
2. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Pada kriteria lansia, pada awalnya usia yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu usia 60 (enam puluh) tahun, namun dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya pada usia 60 tahun masih termasuk usia produktif, maka mulai tanggal 31 Desember 2019, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengubah ketentuan usia lansia penerima bantuan PKH dari usia 60 (enam puluh) tahun menjadi 70 (tujuh puluh) tahun dengan besar bantuan mencapai Rp.2.400.000 per tahun, diberikan tiap trisemester yakni bulan Januari, April, Juli, dan Oktober

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sudah dilaksanakan di beberapa Kabupaten dan Kecamatan di Indonesia termasuk Kabupaten Pelalawan. Menurut data BPS Kabupaten Pelalawan, jumlah masyarakat miskin masih mengalami kenaikan dan penurunan yang belum stabil. Walaupun pada beberapa tahun terakhir ini telah mengalami penurunan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang masuk ke golongan kurang mampu. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pelalawan yang melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Kecamatan Pangkalan Kuras yang memiliki jumlah desa paling banyak, yaitu 17 desa. Salah satu desa yang menerima bantuan PKH adalah Desa Beringin Indah. Di Indonesia PKH mulai dilaksanakan sejak tahun 2007. Sedangkan di Kabupaten Pelalawan PKH dilaksanakan pada tahun 2014, namun di Desa Beringin Indah sendiri Program Keluarga Harapan atau yang lebih sering disebut PKH ini baru dilaksanakan pada tahun 2016.

Tabel 1.3 Jumlah keluarga kurang mampu penerima manfaat PKH

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KPM PKH
1	Tanjung Beringin	1650 Jiwa	18 KK
2	Talau	2650 Jiwa	22 KK
3	Kesuma	7906 Jiwa	133 KK
4	Betung	1881 Jiwa	14 KK
5	Sorek 1	15533 Jiwa	183 KK
6	Sorek 2	3028 Jiwa	22 KK
7	Dundangan	5034 Jiwa	36 KK
8	Surya Indah	2411 Jiwa	20 KK
9	Beringin Indah	2126 Jiwa	8 KK
10	Sialang Indah	3052 Jiwa	23 KK
11	Terantang Manuk	2574 Jiwa	27 KK
12	Palas	2321 Jiwa	10 KK
13	Harapan Jaya	1780 Jiwa	9 KK
14	Meranti	1801 Jiwa	18 KK
15	Kemang	3108 Jiwa	16 KK
16	Batang Kulim	4204 Jiwa	52 KK
17	Sidomukti	2162 Jiwa	13 KK

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Kuras, 2020

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada kecamatan pangkalan kuras terdapat 17 Desa yang mendapat bantuan PKH dan merupakan kecamatan yang memiliki desa terbanyak di Kabupaten Pelalawan. Dari data diatas terlihat Desa Sorek Satu merupakan Desa dengan Jumlah penduduk terbanyak dari desa yang lainnya, yaitu 15533 penduduk dengan jumlah KPM PKH sebanyak 183 KK .

Namun yang akan menjadi fokus penelitian adalah Desa Beringin Indah yang memiliki penduduk sebanyak 2126 dengan jumlah KPM PKH 8 KK. Dapat dilihat bahwa Desa Beringin Indah merupakan desa paling sedikit jumlah KPM PKH nya.

Desa Beringin Indah merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Di Desa Beringin Indah Program Keluarga Harapan atau yang lebih sering disebut PKH ini dilaksanakan pada tahun 2016. PKH ini terbagi menjadi tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada komponen kesejahteraan sosial pada kriteria Lanjut Usia di Desa Beringin Indah. Lanjut Usia merupakan usia dimana sudah tidak lagi produktif untuk bekerja. Lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja lagi tentu hidupnya akan bergantung pada penduduk usia produktif. Jika lansia tinggal dalam keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, hal ini tentunya akan berdampak pada perekonomian yang menanggung lansia tersebut. Karena itulah lansia mendapat perhatian dan masuk ke kategori penerima bantuan PKH.

Berikut merupakan nama-nama masyarakat lansia di Desa Beringin Indah yang kurang mampu :

Tabel 1.4 Daftar Nama Masyarakat Lansia Kurang Mampu di Desa Beringin Indah

No	Nama Lansia Kurang Mampu	Usia	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ibu Yatin	71 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
2	Ibu Katini	70 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
3	Ibu Sarjinhah	74 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
4	Ibu Kastubi	70 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
5	Ibu Turini	69 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
6	Ibu Purba	82 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
7	Ibu Tini/Misni	70 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
8	Ibu Saringatin	69 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
9	Ibu Djiyem	72 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
10	Ibu Tin	71 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
11	Mbah Mastur	80 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
12	Ibu Sawi	70 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
13	Ibu Pasini	73 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah

Sumber : Pendamping PKH Pangkalan Kuras

Berikut nama-nama masyarakat Desa Beringin Indah yang mendapat bantuan PKH :

Tabel 1.5 Daftar KPM PKH Lansia di Desa Beringin Indah

No	Nama KPM Lansia	Usia	Jenis Kelamin	Alamat
1	Ibu Katini	70 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
2	Ibu Sarjinah	74 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
3	Ibu Purba	82 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah
4	Ibu Yatin	71 Tahun	Perempuan	Desa Beringin Indah

Sumber : Pendamping PKH Pangkalan Kuras

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah belum optimal dilaksanakan. Dapat dilihat dari data diatas, bahwa masih banyak masyarakat lansia yang tergolong kurang mampu tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dari pemerintah. Hanya ada beberapa orang dari kriteria lansia kurang mampu yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan. Terdapat juga beberapa permasalahan dan kendala yang muncul pada saat proses pelaksanaan PKH, baik itu dari tim pelaksana maupun dari peserta PKH itu sendiri. Hal ini tentunya akan menyebabkan belum sejahterahnya kelompok lansia kurang mampu di Desa Beringin Indah

Dari masalah yang peneliti paparkan diatas, dapat peneliti temui fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, yaitu :

1. Berdasarkan pengamatan sementara yang penulis dapatkan ada indikasi tidak meratanya pemberian bantuan PKH terhadap masyarakat di Desa Beringin Indah. Disini terlihat dari jumlah masyarakat hanya sebagian masyarakat

kurang mampu terkategori lansia yang mendapat bantuan PKH. Masih banyak lansia yang belum mendapatkan bantuan PKH.

2. Kurangnya kesadaran dari masyarakat penerima bantuan PKH dalam memenuhi kewajiban sebagai keluarga penerima manfaat bantuan PKH.
3. Kurang akuratnya pendataan, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan Program keluarga harapan, justru tidak terdaftar menjadi peserta Program Keluarga harapan.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul **“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 ?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini, yaitu

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama berkaitan dengan pelaksanaan

Program Keluarga Harapan yang dapat di gunakan mahasiswa bidang keilmuan ilmu pemerintahan

b. Kegunaan Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan informasi dan data sekunder yang dapat di jadikan referensi oleh mahasiswa maupun kalangan akademis yang ingin meneliti dalam bidang yang sama.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan menjadi bahan masukan bagi pihak pelaksana Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan di harapkan menjadi tambahan informasi bagi pihak pelaksana Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah agar lebih maksimal dalam melaksanakan dan memberikan bantuan Program Keluarga Harapan yang tepat dan sesuai.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian maka penulis akan memaparkan beberapa teori yang sesuai dengan judul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020”. Adapun teori yang di gunakan adalah teori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafii (2005:36) , Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjalankan koordinasi dan kemampuan memimpin dalam bidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam hubungan pusat maupun hubungan daerah.

Konsep Ilmu Pemerintahan menurut Ndaraha (1997) mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dalam hal ini adalah unit kerja publik yang bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan layanan publik dalam hubungan pemerintahan. Sehingga ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu dinas dalam menjalankan fungsinya dan bagaimana mempelajari hubungan dinas sebagai penyelenggara Pemerintahan baik hubungan dengan sesama dinas maupun dengan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di peroleh pokok pemahaman tentang ilmu pemerintahan di antaranya yaitu:

- 1) Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang mengkaji permasalahan-permasalahan dalam organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan organisasi publik.
- 2) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari prosedur, struktur dan serangkaian kegiatan badan-badan publik dalam melaksanakan fungsi dan tugas suatu lembaga untuk mencapai tujuan negara.
- 3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari suatu proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang di dasarkan pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat dan oleh sebab itu ilmu pemerintahan mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Menurut (Labobo 2011) Ilmu Pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dalam relasi yang memerintah dan yang diperintah. Sedangkan menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul kybernologi (T. Ndraha 2002) Ilmu pemerintahan mempelajari dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya sehingga dapat diterima oleh orang yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan, yaitu :

- 1) Yang di perintah
- 2) Tuntutan yang di perintah (jasa-publik dan layanan-civil)
- 3) Pemerintah
- 4) Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
- 5) Hubungan pemerintahan
- 6) Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya
- 7) Bagaimana pemerintah yang demikian itu
- 8) Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya
- 9) Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman?

2. Konsep Pemerintahan

Yang di maksud dengan pemerintahan menurut (T. Ndraha, 174) menyebutkan bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan akan jasa publik dan pelayanan sipil. Sedangkan pemerintah adalah yang memiliki wewenang mengelola pelayanan publik dan pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemerintah memiliki 3 fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu:

- Fungsi pembangunan
- Fungsi pemberdayaan

- Fungsi pelayanan

(Manan 2001) mengartikan pemerintahan sebagai alat kelengkapan negara, dapat di artikan ke dalam arti luas dan arti sempit. Di dalam konteks yang luas pemerintahan adalah bagian dari alat kelengkapan negara yang terdiri lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif yang bertindak diatas nama negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang menyelenggarakan administrasi negara.

Sedangkan menurut Ndraha dalam (Rauf 2018, 10) , pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses wewenang pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang di perintah. Lebih lanjut Ndraha menyatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi berbagai kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan proses layanan sipil.

Jadi, menurut penulis sendiri ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang di dalamnya terdapat kewajiban seorang pemerintah memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar hidup dengan lebih baik.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2014 Pasal 1 di sebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggara negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi
- i. Efektivitas
- j. Keadilan

Pada pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah daerah dituntut untuk



meningkatkan fungsi pokok pemerintahan yaitu pelayanan, pembangunan, pengaturan dan pemberdayaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(Hanif 2007, 24) Konsep pemerintahan daerah berasal dari local government yang memiliki arti pemerintah lokal, pemerintahan lokal dan wilayah lokal Hoessein dalam. Dalam pengertian pertama pemerintah lokal berarti penyelenggara pemerintahan yang terdiri dari badan, organisasi, maupun lembaga. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan lokal adalah orang yang mempunyai wewenang memimpin setiap pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam pengertian kedua pemerintahan lokal mempunyai arti berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing daerah. dan untuk pengertian ketiga pemerintahan lokal adalah wilayah pemerintah atau daerah otonom yaitu daerah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, terdapat beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sendiri.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah, atau kepada instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atas dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa konsep pemerintahan daerah di dalamnya terdiri dari organisasi, lembaga, instansi, dan kegiatan yang ada dalam suatu daerah pemerintahan.

4. Konsep Kebijakan

Menurut James E. Anderson dalam (Indiahono 2009, 17) kebijakan adalah perilaku dari setiap pejabat, kelompok maupun instansi pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu..

Selanjutnya menurut Carl Frierich dalam Agustino (20127) kebijakan adalah rangkaian keputusan atau tindakan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.

Sedangkan menurut (Tangkisilan 2003, 7) kebijakan merupakan suatu aktifitas yang telah di arahkan pada suatu tujuan dan kriteria tersendiri berdasarkan dari segi aktifitas fisik dan perspektif murni yang memiliki tujuan ke arah masa depan yang dkehendaki. ketentuan yang akan di jadikan acuan,

landasan dan petunjuk bagi setiap penyelenggara pemerintah sehingga akan mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Dari beberapa konsep kebijakan diatas menunjukkan bahwa pejabat pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan unsur tujuan dan sarana yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Dengan demikian kebijakan berkaitan dengan cara dan sasaran yang dibuat untuk mencapai tujuan.

5. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan keputusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Suatu kebijakan publik akan terasa penting apabila telah di jalankan dan di mengimplementasikan. Karna pengimplementasian merupakan aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi.

Menurut Anderson dalam (Tachjan 2006, 16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilator), melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator), menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator), memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alkator)” Hoogerwerf dalam (Tachjan 2006, 16).

Kemudian Chandler dan Plano sebagaimana dikutip (Tangkisilan 2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang ada di dalam

pemerintah maupun politik. Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi suatu permasalahan baik krisis sosial maupun masalah politik. Dalam pembuatan kebijakan publik harus memperhatikan unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

1. Jumlah orang yang ikut mengambil kebijakan publik, artinya bahwa dalam proses pembuatan kebijakan publik seorang pejabat dapat membuat kebijakan secara individu maupun secara bersama sama.
2. Peraturan yang mengatur dalam pengambilan kebijakan publik, yang dimaksud dengan peraturan pembuat kebijakan publik adalah ketentuan yang mengatur mengenai jumlah orang maupun penentuan suatu kebijakan.
3. Informasi, dalam pembuatan kebijakan publik kelengkapan dan keakuratan dalam informasi mempengaruhi isi kebijakan publik yang di ambil.

6. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (Winarno, Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan studi Kasus : edisi dan Revisi Terbaru 2012, 101 - 102) adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil (Tachjan 2006).

Edward III dalam (Widodo 2010) mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi Struktur Birokrasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi Implementasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (201098) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (201098) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (201098) menyatakan bahwa “mungkin sumber daya yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf”.

2) Sumberdaya Anggaran/Finansial

Edward III dalam Widodo (2010100) menyatakan dalam kesimpulan studinya terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010100) menyatakan bahwa “terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program”. Edward III dalam Widodo (2010101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan

optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010102) menyatakan : Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed

4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010103) menyatakan bahwa pelaku utama

kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150) “Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau

tipetipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

Menurut Edwards III, di antara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh pada implementasi. Model tersebut dapat disajikan sebagai berikut (Tachjan 2006) :

8. Konsep Kesejahteraan Sosial

Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial

guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam publikasi Data dan Informasi kemiskinan (2009), kesejahteraan mencakup bidang-bidang kehidupan yang sangat luas dan semua aspeknya tidak dapat diukur. Kesejahteraan dalam dunia modern ialah sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik itu seperti kebutuhan makanan, air layak minum, pakaian, tempat tinggal, ataupun pendidikan dan memiliki pekerjaan yang tetap.

9. Konsep Program Keluarga Harapan

Menurut Kemensos (2016:6), Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

Tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta Program Keluarga Harapan yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).

Adapun kewajiban penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka menerima bantuan pada kriteria lansia, antara lain:

1. Wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan
2. KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulannya.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak mendapatkan :

1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
2. Pendampingan Program Keluarga Harapan
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah :

- 1) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007
- 2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program Keluarga Harapan
- 3) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang "Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.

- 4) Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi/TKPKD".
- 5) Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten/Kota/TKPKD".
- 6) Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan

B. Penelitian Terdahulu

Dari berbagai keseluruhan penelitian, peneliti memilih berbagai acuan penelitian sebelumnya yang membahas tentang Pelaksanaan Program PKH yaitu sebagai berikut :

1. Eni Ardianti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang”. Ia menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bukit Bestari belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa masalah seperti sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh serta proses pengawasan dan pendampingan masyarakat belum dilakukan secara optimal karena jumlah pendamping yang kurang.
2. Kemudian, Syarif Hidayat (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan Meliputi Partisipasi, Pemberdayaan, Dan Kinerja Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pulau Pangung” memaparkan alasan pemerintah meluncurkan program PKH di Kecamatan Pulau Pangung karena tingginya jumlah rumah

tangga miskin. Dan dari hasil evaluasi membuktikan bahwa penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Panggung mengalami penurunan.

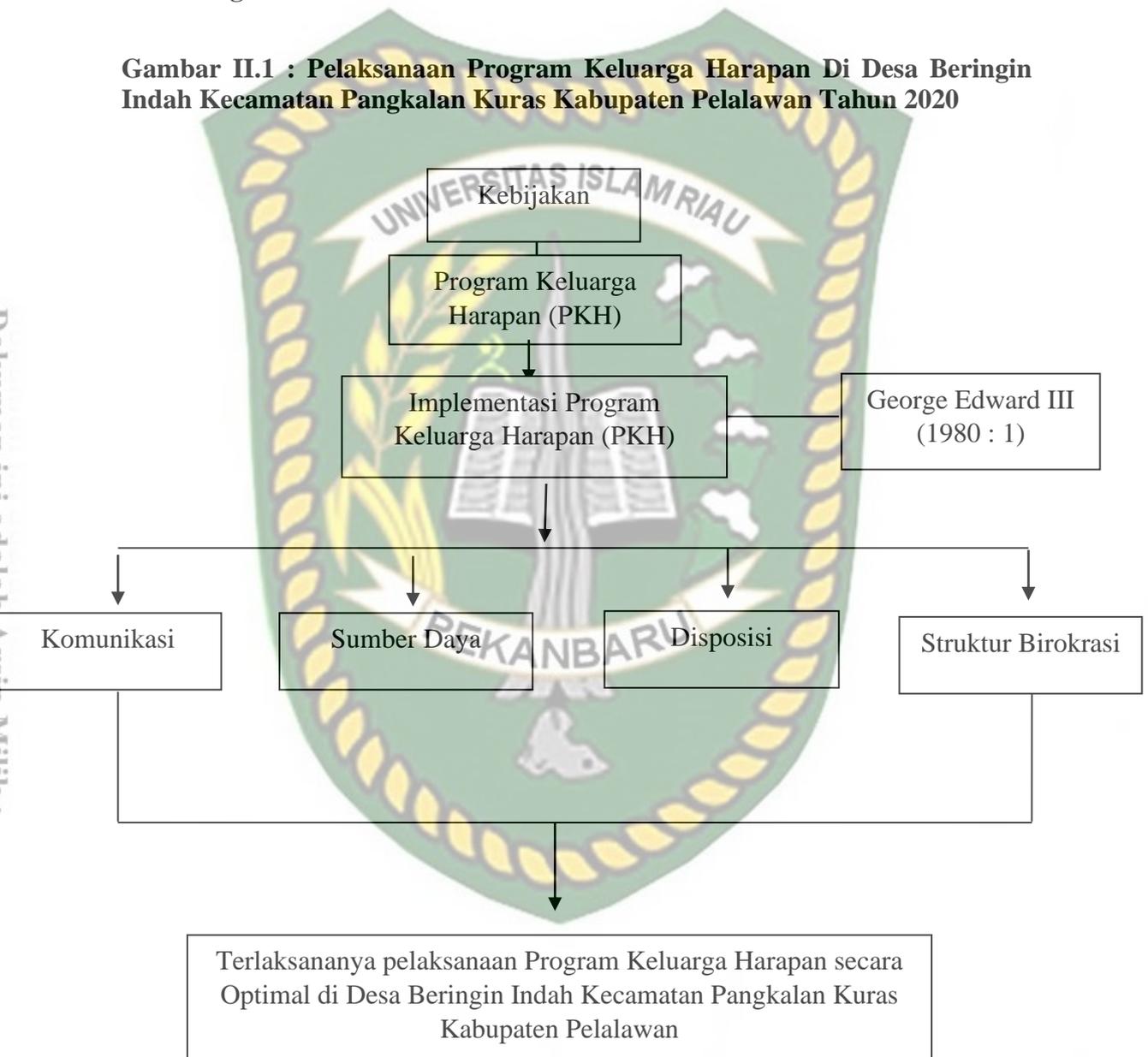
3. Selanjutnya Antriya Eka Suwinta (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar”. Ia menjelaskan pelaksanaan PKH di Desa Maron kurang berhasil. Walaupun tahapan yang dilalui berjalan kurang lancar, hal ini dikarenakan adanya kendala seperti kurang sadarnya peserta Program Keluarga Harapan terhadap inti sari Program Keluarga Harapan dan arti pentingnya Program Keluarga Harapan bagi kehidupan peserta Program Keluarga Harapan.
4. Pada Penelitian Daud Rismana (2019) yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Ia membahas mengenai Program Keluarga Harapan merupakan upaya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada Permensos No 1 Tahun 2018.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini memfokuskan kepada Implementasi dari Program Keluarga Harapan itu sendiri. Penulis lebih menekankan bagaimana pelaksanaan ini agar menjadi lebih optimal, khususnya pada kriteria Lansia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak hal-hal yang membuat tidak optimalnya tersebut. Penulis menggunakan indikator :komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Adapun lokasi penelitian mengenai Program ini adalah Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tahun 2020 yang belum

terdapat penelitian secara khusus mengenai Pelaksanaan PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020



Sumber: modifikasi peneliti 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan serta menghindari kesalahan dalam menganalisa data dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membuat konsep operasional yang nantinya dapat digunakan pembaca agar lebih mudah dalam memahami maksud dari tujuan penulis, yaitu di antaranya :

1. Implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.
2. Pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan melindungi dan memenuhi kebutuhan akan jasa publik dan pelayanan sipil.
3. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
4. Program Keluarga Harapan dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Pada tahun 2020. Kategori lanjut usia atau lansia
5. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan
6. Sumber Daya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan
7. Disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan

			<p>dipahami oleh pelaksana</p> <p>3. Tersedianya fasilitas yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan</p>
		c. Disposisi	<p>1. Keaktifan tim pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan penyaluran dana PKH.</p>
		d. Struktur Birokrasi	<p>1. Adanya SOP sebagai tuntunan Pelaksanaan PKH</p> <p>2. Adanya koordinasi tim pelaksana dengan pihak desa yang bersangkutan.</p>

Sumber: modifikasi peneliti 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan yang sebagaimana adanya di lapangan sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang di teliti sehingga memperoleh hasil terhadap masalah (Sugiyono, 2012:80). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa statistik, sudah jelas bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya untuk membangun penelitian yang rinci, di bentuk dengan kata-kata, gambaran yang lengkap dan rumit karena menyangkut kehidupan sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang teliti.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, maka penulis akan meneliti di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Semua di lakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah belum berjalan dengan optimal, hal ini karena masih adanya penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan Program Keluarga Harapan tersebut, namun tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan tersebut, hal ini tentu nya akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dinuatnya Program Keluarga Harapan, yaitu mengurangi angka kemiskinan.

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (2015:163). Penulis memilih beberapa informan yang dianggap cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian, yaitu :

- 1) Masyarakat Penerima bantuan PKH kriteria Lansia.
- 2) Kepala Desa Beringin Indah
- 3) Pengawas PKH Desa Beringin Indah,

2. Key Informan

Key informan adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Adapun yang menjadi key informan penelitian ini adalah Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras.

D. Teknik Penarikan Informan

Menurut (Sugiyono 2016, 367) dalam penelitian kualitatif teknik penarikan informan yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling, dengan mempertimbangkan bahwa key informan dan informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah yang terjadi pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk mencari sumber data.

E. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang menguntungkan karena tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Berdasarkan metode penelitian yang telah penulis sebutkan di atas, maka data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono 2016).

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari objek penelitiannya langsung atau

yang disebut dengan responden. Responden yaitu orang yang di teliti untuk di mintai keterangan atau informasinya melalui observasi. Data primer yang ingin di peroleh yaitu data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Diantaranya tanggapan responden melalui data hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang di perlukan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang di teliti. Adapun data sekunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang di butuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah srtaegis dalam suatu penelitian, karna tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan yang di butuhkan oleh peneliti, sehingga tanpa teknik pengumpulan data peneliti akan sulit untuk mendapatkan data yang mendukung tujuan penelitian (Sugiyono 2016, 224)

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Obsevasi

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan atau fakta-fakta yang di peroleh langsung oleh peneliti berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati langsung objek yang akan di teliti sehingga peneliti dapat menilai mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Pangkalan Kuras.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pembicaraan yang di lakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menemukan permasalahan yang akan di teliti. Menurut (Martono 2015) mendefinisikan wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada seseorang (informan atau responden). Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam (Sugiyono 2016) mengemukakan bahwa hal yang harus diperhatikan oleh ketika menggunakan teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Responden adalah orang yang paling tahu dengan dirinya sendiri.
- b. Memastikan bahwa yang di nyatakan responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang di maksudkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Menurut (Martono 2015) mendefinisikan dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut (Gunawan 2013) analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, mengatur, mengkategorikan, mengurutkan, dan memberikan tanda atau kode untuk memperoleh suatu temuan terhadap masalah yang ingin di jawab. Dengan aktivitas tersebut data yang semulanya masih tidak beraturan dapat di sederhanakan dan kemudian mudah untuk di pahami. Analisis data kualitatif sejatinya sudah dapat di lakukan secara bersamaan ketika proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan tersebut dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data.

Teknik analisis yang di lakukan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis menurut miles dan huberman yaitu teknik analisis data interaktif. Dimana analisis yang di lakukan secara interaktif dan terus menerus sampai suatu data itu jenuh.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Jadwal dan kegiatan dalam usulan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, mulai dari penyusunan rencana, menetapkan judul, proses pelaksanaan, hingga menjadi sebuah usulan peneliti semestinya. Adapun rencana jadwal kegiatan penelitian optimalisasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan adalah sebagai berikut:

Tabel III.1: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian pelaksanaan Program

Keluarga Harapan di Desa Beringin Indah Kec. Pangkalan Kuras Kab.

Pelalawan

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																																							
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																																				
2	Seminar UP																																								
3	Revisi UP																																								
4	Revisi Wawancara																																								
5	Analisis Data																																								
6	Bimbingan Skripsi																																								
7	Revisi Skripsi																																								
8	ACC Skripsi																																								
9	Ujian Skripsi																																								
10	Perbaikan																																								

Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan dalam bab ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini memuat tentang penelitian relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil peneliti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Secara Umum Desa Beringin Indah

1. Sejarah Singkat Desa Beringin Indah

Desa Beringin Indah adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pada mulanya, Desa Beringin Indah adalah desa transmigrasi dengan nama Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) III SBP Sorek. Yang merupakan bagian dari wilayah Desa terantang manuk Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Sedangkan awal penempatan dimulai pada februari tahun 1992 sampai dengan awal bulan februari 1994.

Sejarah kepemimpinan Desa Beringin Indah :

- a. Ahmadi Rahmat (1994-1997) sebagai Pjs. Kepala Desa Beringin Indah
- b. Ahmadi Rahmat (1997-2012) sebagai Kepala Desa Beringin Indah
- c. Suryadi (2012-2021) sebagai Kepala Desa Beringin Indah
- d. Muh Safari (2021-sekarang) sebagai Kepala Desa Beringin Indah

Dan dipertengahan tahun 1998 oleh bapak Kepala kantor Unit Pemukiman Transmigrasi (KKUPT) diberi nama Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar. Hingga pada tanggal 22 Desember 2002 oleh Pemda Kabupaten Pelalawan diakui dan ditetapkan menjadi Desa Divinitif melalui Nomor 61 Tahun 2002. Kabupaten Pelalawan merupakan pemekaran dari Kabupaten kampar pada bulan Oktober 1999.

2. Keadaan Geografi Desa Beringin Indah

Wilayah Desa Beringin Indah memiliki luas 13.20 km², yang di dominasi perkebunan seluas 1000 Ha, pemukiman 250 Ha, ladang/tegalan 60 Ha, perkantoran 2,5 Ha, masjid 5,5 Ha, sekolah 4 Ha, dan lapangan sepak bola 2 Ha. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Beringin Indah adalah petani.

Batas-batas wilayah Desa Beringin Indah yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Palas
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Terantang Manuk
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sialang Indah
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Surya Indah

Jarak Desa Beringin Indah dengan Ibukota Kecamatan, kabupaten, dan Provinsi adalah :

1. Jarak dengan Ibukota Kecamatan adalah 20 km
2. Jarak dengan Ibukota Kabupaten adalah 40 km
3. Jarak dengan Ibukota Provinsi adalah 74,1 km

Desa Beringin Indah merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) desa di Kecamatan Pangkalan Kuras. Wilayah administrasi pemerintahan Desa Beringin Indah terdiri atas dua dusun, yaitu :

1. Dusun I Mulya Indah : terdiri dari 2 RW dan 8 RT,
2. Dusun II sari Indah : terdiri dari 2 RW dan 8 RT.

Waktu tempuh dari dan ke desa beringin Indah meliputi :

1. Ke Ibukota Kecamatan ± 30 menit

2. Ke Ibukota Kabupaten \pm 60 menit (1 jam)
3. Ke Ibukota Provinsi \pm 150 menit (2,5 jam)

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan angka kelahiran tahun 2020 jumlah penduduk Desa Beringin Indah adalah 2.136 jiwa dari 273 kk. Desa Beringin Indah merupakan salah satu desa yang cukup lama berdiri di Kecamatan Pangkalan Kuras, dimana penduduk yang bertempat tinggal di Desa Beringin Indah ini masih bersifat heterogen yang mana dari berbagai daerah, baik dari luar sumatera seperti Jawa maupun dalam sumatera.

Jumlah penduduk Desa Beringin Indah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.1 : jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

N	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1048 jiwa
2	Perempuan	1088 jiwa
	Jumlah	2.136 jiwa

Sumber : Kantor Desa Beringin Indah, 2020

Jumlah penduduk Desa Beringin Indah berdasarkan usia dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.2: jumlah penduduk berdasarkan usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	Usia 0-9 Tahun	263 jiwa
2	Usia 10-19 Tahun	257 jiwa
3	Usia 20-29 Tahun	301 jiwa
4	Usia 30-39 Tahun	361 jiwa
5	Usia 40-49 Tahun	365 jiwa
6	Usia 50-59 Tahun	315 jiwa
7	Usia 60>	274 jiwa
	Jumlah	2.136 jiwa

Sumber : Kantor Desa Beringin Indah, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah perbandingan usia penduduk di Desa Beringin Indah hampir seimbang.

Penduduk Desa Beringin Indah mayoritas beragama islam dan minoritas beragama Katolik dan Protestan. Untuk melakukan peribadatan telah dibangun beberapa masjid dan mushala, serta gereja agar meningkatkan ibadah penduduk sesuai dengan agama nya masing-masing. Di Desa Beringin Indah terdiri dari 5 bangunan masjid, 3 mushala, dan 2 gereja.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk menurut jenis mata pencaharian di Desa Beringin Indah dapat dilihat pada dari tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Mata Pencaharian Penduduk Desa Beringin Indah

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Perangkat Desa	10 jiwa
2	PNS-Pensiunan-TNI/Polri	40 jiwa
3	Petani	920 jiwa
4	Guru Non PNS	24 jiwa
5	Buruh	128 jiwa
6	Karyawan	389 jiwa
7	Tenaga tukang	2 jiwa
8	Lainnya	623 jiwa
Jumlah		2136

Sumber : Kantor Desa Beringin Indah

Dilihat dari tabel diatas, mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Beringin Indah adalah petani. Penduduk yang mata pencahariannya petani biasanya memiliki perkebunan seperti sawit.

5. Luas Pertanahan

Desa Beringin Indah memiliki daerah seluas 189 ha, dimana 70 % nya sudah bersertifikat dan 30 % nya belum bersertifikat, Tanah Kas Desa 32 ha, Jalan 7 ha, Perkarangan/Perumahan 56 ha, Perkebunan 117 ha, serta Bangunan seluas 9 ha. Luas tanah di Desa Beringin Indah di dominasi perkebunan, yaitu perkebunan sawit karena sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Beringin Indah adalah petani.

6. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Desa Beringin Indah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Tingkat pendidikan di Desa Beringin Indah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD	97 Jiwa
2	Belum tamat SD	290 Jiwa
3	Tamat SD/Sederajat	808 Jiwa
4	Tamat SMP/Sederajat	418 Jiwa
5	Tamat SMA/Sederajat	413 Jiwa
6	Diploma Satu (D1)	1 Jiwa
7	Diploma Dua (D2)	5 Jiwa
8	Strata Satu (S1)	107 Jiwa
9	Strata Dua (S2)	7 Jiwa

Sumber : Kantor Desa Beringin Indah

Sedangkan sarana prasarana pendidikan yang ada di Desa Beringin Indah

yaitu sebagai berikut:

Tabel IV.5 : Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Beringin Indah

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	TK	1
2	Sekolah Dasar (SD)	1
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-
4	Sekolah Menengah Atas (SMA) / (SMK)	-
5	Madrasah	1

Sumber : Kantor Desa Beringin Indah

B. Pemerintahan Desa Beringin Indah

1. Aparat Desa Beringin Indah

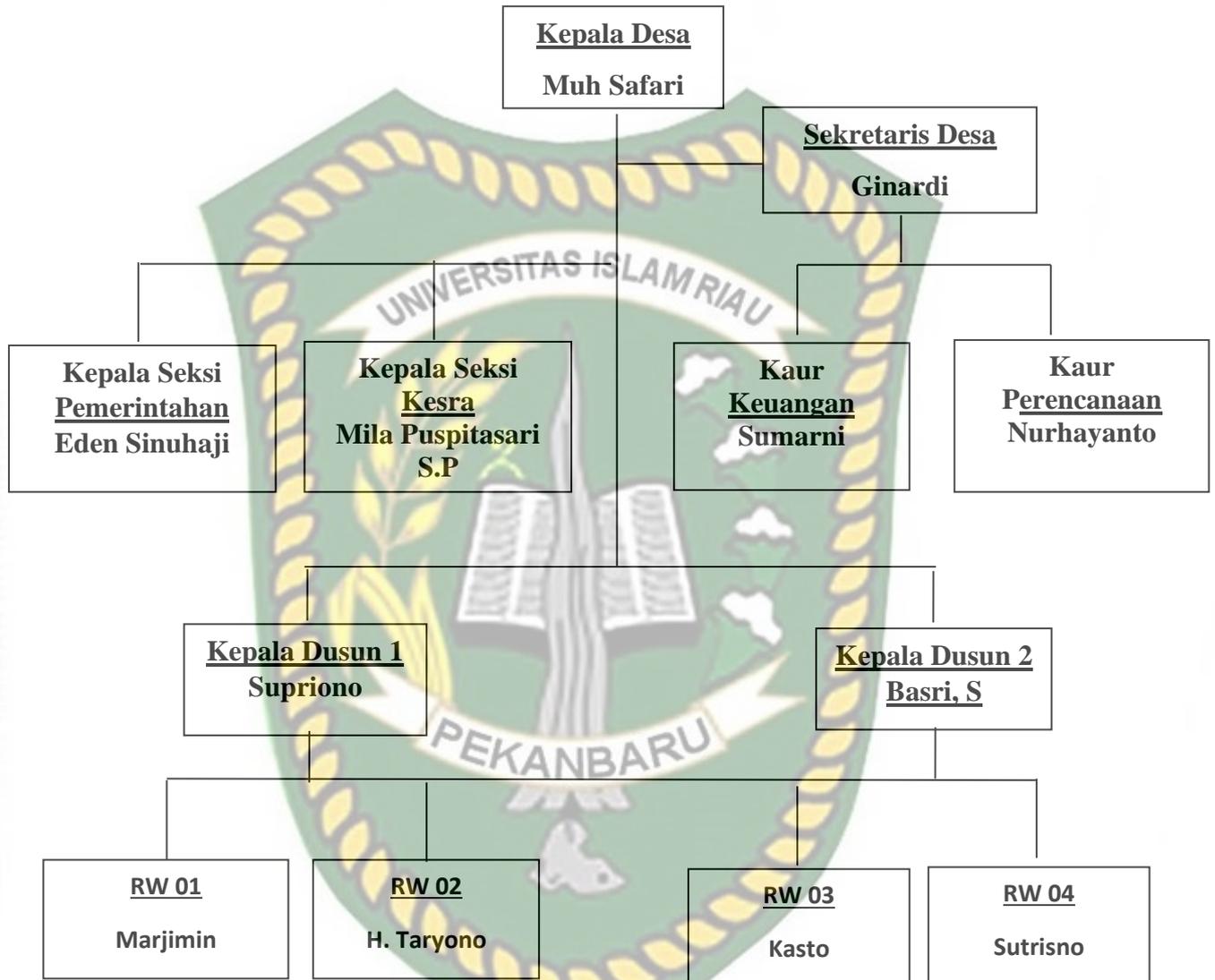
Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pemerintah di Desa Terantang Manuk daerah dibagi 2 dusun. Desa Beringin Indah dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang langsung dipilih oleh masyarakat melalui Pilkades dan dilantik oleh Bupati. Kepala Desa memiliki Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Tabel IV.6 : Jumlah perangkat Desa Beringin Indah

No	Aparat Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kepala Dusun	2 orang
4	Kepala Seksi (Kasi)	2 Orang
5	Kepala Urusan (Kaur)	2 Orang
6	Staf / TU	1 Orang
7	Anggota BPD	5 Orang
8	Anggota LPMD	5 Orang

Sumber : Kantor Desa Beringin Indah

2. Struktur pemerintahan Desa Beringin Indah



Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Desa Beringin Indah

Tujuan dibentuknya aparat pemerintahan desa yaitu untuk membantu tugas Kepala Desa dalam menjalankan dan mengatur pemerintahan Desa Beringin Indah agar berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.

3. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Beringin Indah

Visi Desa Beringin Indah yaitu “Kemandirian Desa Beringin Indah Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Kabupaten Pelalawan”

1. **Kemandirian** yang diartikan bahwa Desa Beringin Indah memiliki sumber daya manusia masyarakat berdemokrasi, akses pendidikan, sumber daya kelembagaan desa, ada daya partisipasi /gotong royong, sumber daya alam, sumber daya keagamaan dan keraifan lokal yang mampu dikelola secara mandiri.
2. **Pusat pertumbuhan** adalah pemerintahan berbasis sumber daya manusia, Ekonomi, pertanian/perkebunan, peternakan, kearifan lokal yang dalam proses kebijakan keberlanjutan dan menitikberatkan menyebarluaskan pusat pertumbuhan akan kesejahteraan produktif dan berkelanjutan.
3. **Lokal Potensi** /aset daya yang dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan bersama-sama masyarakat yang ada prakteknya.
4. **Nilai-nilai agama** dapat dimaknai bahwa setiap aktifitas yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah Desa Beringin Indah dan masyarakat Desa Beringin Indah dapat mencerminkan perilaku hidup terpuji sebagai perwujudan dari nilai-nilai Agama.

5. **Accidong Sipangadakkang** bahwa penyelenggaraan Pemerintah dan pengelolaan Desa Beringin Indah dan rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan Desa secara Adil dan merata dan memposisikan masyarakat sebagai pelaku ,dan pengelolaan Desa Beringin Indah (Ankuntabel,Transparan ,dan Partisipatif)
6. **Budaya** dapat diartikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa kita untuk saling sipakainga, sipassiriki, sikapaccei, sikamaseang, dan assamaturu agar tali persaudaraan tetap kokoh sehingga dapat menjadi kunci kesuksesan dalam pembangunan Desa Beringin Indah yang dicita-citakan bersama.

Adapun Misi Desa Beringin Indah adalah :

Program Fisik:

1. Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang transportasi,baik jalur pertanian,perkebunan warga dan lintas Desa.
2. Membangun Sarana olah raga yang layak bagi generasi muda.
3. Peningkatan sarana pelayanan dasar Desa
4. Fasilitas pengadaan pupuk bagi petani
5. Penyusunan Perencanaan Desa secara parsipatif

Program Non Fisik:

1. Menciptakan aparat pemerintahan yang profesional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal.
2. Mendorong lembaga yang ada di Desa dalam peningkatan Kapasitas penyiapan fasilitas dan pengelolaan biaya operasional kelembagaanya.

3. Fasilitasi Beasiswa anak sekolah ,SD,SLTP,SLTA bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.
4. Meningkatkan kapasitas kelompok PKK dan Majelis Ta'lim
5. Membina kelompok Tani dan peternak dalam pengelolaan pertanian dan peternakan

4. Uraian Tugas, Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Adapun tugas dan fungsi Kepala Desa sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Adapun tugas dan fungsi sekretaris Desa meliputi;

1) Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2) Fungsi:

- Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
- Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (Kaur) Kesra

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

2. Fungsi :

- Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
- Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- 2) Fungsi :
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa

- Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

e. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan

- 1) Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
- 2) Fungsi :
 - Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f. Kepala Dusun

1. Tugas
 - Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

- Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
 - Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
2. Fungsi
- Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
 - Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
 - Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
 - Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan penelitian sangatlah wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan, informan dalam penelitian ini yaitu seseorang yang memberikan informasi dan diharapkan dapat menjawab semua permasalahan yang ditanyakan secara jelas dan lengkap. Informan tersebut terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan Desa Beringin Indah, Ketua Pelaksana Program Keluarga Harapan kriteria lansia Desa Beringin Indah, dan Masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan kriteria lansia di Desa Beringin Indah.

Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 ini penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin informan, usia informan dan pendidikan informan.

Untuk mengetahui identitas key informan dan informan bisa dilihat dari tabel keterangan dibawah ini yaitu :

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian Penulis tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Saripah, S.K.M	Pendamping PKH di Desa Beringin Indah	Key Informan
2	Sulasmi Nur	Pengawas PKH di Desa Beringin Indah	Informan
3	Muh Safari	Kepala Desa Beringin Indah	Informan
4	Sarjinhah	Masyarakat Lansia Desa Beringin Indah penerima PKH	Informan
5	Katini	Masyarakat Lansia Beringin Indah penerima PKH	Informan
6	Ngadinem	Masyarakat Lansia Beringin Indah penerima PKH	Informan
7	Yatin	Masyarakat Lansia Beringin Indah penerima PKH	Informan

Sumber : Data Olaha Peneliti Tahun 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari satu key informan yaitu Ketua Tim Pelaksana PKH di Desa Beringin Indah dan enam orang informan yaitu pendamping PKH di Desa Beringin Indah, Kepala Desa Beringin Indah dan Masyarakat Lansia Beringin Indah penerima PKH.

1. Usia informan

Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat

analisis dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan di ajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan.

Kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini, sehubungan dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan maka pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.2 Identitas Key Informan Informan Penelitian Penulis tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase (%)
1	25-35	1	15%
2	35-45	2	30%
3	45-55	3	45%
4	55-65	-	-
5	65-75	1	15%
	Jumlah	7	100 %

Sumber: Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang terdiri Ketua Tim Pelaksana PKH di Desa Beringin Indah dan enam orang informan yaitu pendamping PKH di Desa Beringin Indah, Kepala Desa Beringin Indah dan Masyarakat Lansia Beringin Indah penerima PKH berdasarkan kriteria umur terdiri dari 1 orang dengan kriteria umur 25-35 tahun dengan persentase 16,5%, 1 orang dengan kriteria umur 35-45 tahun dengan persentase 16,5%, 3

orang dengan kriteria umur 45-55 tahun dengan persentase 49,5%, dan orang dengan kriteria umur 65-75 tahun dengan persentase 16,5%.

2. Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan pemahaman maupun pola pikir terhadap suatu masalah penelitian. Untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3 Identitas Key Informan Informan Penelitian Penulis Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Pria	1	15%
2	Wanita	6	85%
Jumlah		7	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang terdiri Ketua Tim Pelaksana PKH di Desa Beringin Indah dan enam orang informan yaitu pendamping PKH di Desa Beringin Indah, Kepala Desa Beringin Indah dan Masyarakat Lansia Beringin Indah penerima PKH berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 1 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 15% dan orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 85%.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara informan satu dengan informan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang di angkat dalam penelitian, pemahaman informan juga tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Dalam penelitian tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

Tabel V.4 Identitas Key Informan Informan Penelitian Penulis Identitas Key Informan Informan Penelitian Penulis Tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Sekolah Dasar (SD)	1	15%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	30%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	45%
4	Diploma III (D3)	-	-
5	Strata I (S1)	1	15%
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang terdiri Ketua Tim Pelaksana PKH di Desa Beringin Indah dan enam

orang informan yaitu pendamping PKH di Desa Beringin Indah, Kepala Desa Beringin Indah dan Masyarakat Lansia Beringin Indah penerima PKH berdasarkan tingkat pendidikan yaitu 1 orang berpendidikan SD dengan Persentase 15%, 2 orang berpendidikan SMP dengan persentase 30%, 3 orang berpendidikan SMA dengan persentase 45%, 1 orang berpendidikan S1 dengan persentase 15%.

B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Pelaksanaan suatu Program atau kebijakan merupakan hal paling penting dalam perumusan tujuan dari sebuah organisasi. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut hendaklah menggunakan indikator atau tolak ukur yang dijadikan sebagai acuan berlangsungnya pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan atau yang biasa di sebut PKH. Keberadaan PKH ini dapat meringankan kesulitan ekonomi bagi para penerima bantuan PKH tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan Program keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagaimana pada pembahasan dibawah ini:

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik. Komunikasi merupakan proses yang penting dalam sebuah pengimplementasian program, karena melalui komunikasi inilah terjadinya pertukaran informasi dari pemberi informasi kepada penerima informasi. Penyampaian informasi ini disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, komunikasi merupakan mekanisme dan syarat utama dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi yang dimaksud yaitu menunjukkan bagaimana pelaksana berkomunikasi dalam menjalankan PKH khususnya pada kriteria Lansia di Desa Beringin Indah. Komunikasi pelaksanaan kebijakan yaitu berupa sosialisasi, penyebaran informasi, dan tata cara ketentuan suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan tersebut.

a. Proses Penyampaian Informasi

Proses penyampaian informasi ini dilaksanakan agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga

masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informan* yaitu pendamping PKH di Desa Beringin Indah, Ibu Saripah S.K.M pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 09.30 WIB mengenai bagaimana proses komunikasi yang dilakukan saat pendampingan kepada KPM di Desa Beringin Indah, Ibu Saripah S.K.M menjawab :

“Untuk proses komunikasi yang saya lakukan saat pendampingan kepada KPM, sudah saya lakukan sebaik mungkin. Saya berinteraksi dengan kelompok KPM saat melakukan sosialisasi, yaitu pendampingan. Saat pendampingan, saya menjelaskan secara rinci mengenai apa itu Program PKH, tujuan-tujuannya, serta hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai peserta PKH. Seperti melakukan pertemuan tiap bulan, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan lainnya. Namun, masih ada juga sebagian peserta PKH yang tidak rutin datang ke pertemuan bulanan. Padahal itu merupakan kewajiban mereka sebagai peserta PKH.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat melihat bahwa proses penyampaian informasi sudah berjalan dengan baik. Pendamping telah melakukan pendampingan di Desa Beringin indah sebagaimana mestinya. Proses penyampaian yang dilakukan pendamping adalah melakukan pertemuan bulanan, pemberian materi kepada KPM, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *informan* yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.25 mengenai bagaimana sosialisasi yang dilakukan pelaksana terhadap masyarakat penerima bantuan saat melakukan kegiatan PKH, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut

”Sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping terhadap peserta PKH itu biasanya saat ada kegiatan pendampingan, kami membahas kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Tetapi terkadang untuk bagian lansia perlu dijelaskan secara perlahan karena pasti ada juga yang sudah tidak terlalu bisa mendengar. Terkadang kami berinteraksi lewat grup sosial media seperti WhatsApp, lewat grup itu juga saya menyampaikan informasi-informasi kegiatan kepada peserta PKH, misalnya untuk lansia kami mengadakan senam sehat lansia setiap minggu nya, jadi diumumkannya di grup itu.”

Dari tanggapan Ibu Sulasmi Nur sebagai Pengawas PKH di Desa Beringin Indah memberikan penjelasan bahwa pelaksana sudah menyampaikan informasi dengan baik, dan selalu cepat tanggap dalam menyampaikan informasi yang mendesak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH kriteria Lansia di Desa Beringin Indah, Ibu Sarjinah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 11.10 WIB mengenai bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping dan pelaksana PKH kepada KPM di Desa Beringin Indah, Ibu Sarjinah menjawab :

“Pendamping selalu melakukan pertemuan setiap bulannya. Beliau menjelaskan tentang apa itu PKH, tujuan PKH, kewajiban dan hak-hak kami sebagai peserta PKH, dan banyak lagi. Namun, pendamping menjelaskan nya terlalu cepat jadi saya kurang mengerti. Saya kan sudah tua, pendengaran juga sudah berkurang, jadi sulit mengerti jika dijelaskan sekali saja. Yang saya tau hanya mengikuti pertemuan saja”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH kriteria Lansia di Desa Beringin Indah, Ibu Yatin pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 14.33 WIB mengenai bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping dan pelaksana PKH kepada KPM di Desa Beringin Indah, Ibu Yatin menjawab :

“Menurut saya pendamping sudah melakukan sosialisasi dengan baik, beliau selalu melaksanakan tugasnya seperti pertemuan bulanan, pengecekan kesehatan, pemberian materi.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH kriteria Lansia di Desa Beringin Indah, Ibu Katini pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 15.25 WIB mengenai bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping dan pelaksana PKH kepada KPM di Desa Beringin Indah, Ibu Katini menjawab menjawab :

“Kalau menurut saya pendamping sudah bagus dalam menjelaskan kepada kami, pendamping menjelaskan mengenai apa itu PKH, sanksi, tujuannya, syarat-syaratnya dan lain-lainnya.”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas, peneliti melihat bahwa proses sosialisasi yang dilakukan pendamping sudah baik. Pendamping telah melakukan proses sosialisasi mulai dari penjelasan mengenai program, tujuan, sanksi, syarat, mekanisme, dan lainnya dalam program PKH.

Berdasarkan hasil dari wawancara key informan dan informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penyampaian informasi di Desa Beringin Indah sudah berjalan dengan baik. Yang mana pendamping telah melakukan proses penyampaian informasi dengan benar dan lengkap.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi dalam komunikasi merupakan hasil dari komunikasi, apakah komunikasi telah berjalan dengan baik atau tidaknya. Tujuan dari kejelasan informasi ini adalah agar sasaran mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Hasil

wawancara mengenai kejelasan informasi dalam proses komunikasi di Desa Beringin Indah didapat informasi dari wawancara *key informan* yaitu pendamping PKH di Desa Beringin Indah, Ibu Saripah S.K.M pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 09.30 WIB

“Untuk kejelasan informasi, sudah saya jelaskan dengan sejas-jelasnya. Namun saya menjelaskannya menggunakan bahasa non baku dan secara sederhana yang mudah dipahami oleh orang awam. Apalagi rata-rata peserta PKH kebanyakan ibu-ibu dan ada juga yang sudah lansia. Jadi harus dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Akan tetapi, masih banyak juga peserta PKH yang tidak mengerti mengenai hal-hal yang saya jelaskan, ada juga sebagian yang tidak terlalu mendengarkan ketika saya menjelaskan”

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan *informan* yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.25 yaitu mengenai bagaimana kejelasan informasi yang disampaikan kepada peserta PKH, Ibu Sulasmi Nur memberikan jawabannya sebagai berikut :

”Untuk kejelasan informasi, saya sudah memberikan dan menjelaskan informasi-informasi sebaik mungkin, dan para peserta PKH pun paham terhadap yang saya sampaikan. Tetapi memang harus perlahan-lahan menjelaskannya, apalagi menjelaskan kepada lansia, terkadang para lansia tidak terlalu mengerti tentang program-program, jadi saja jelaskan menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang awam.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH kriteria Lansia di Desa Beringin Indah, Ibu Sarjinah pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 11.10 WIB mengenai bagaimana kejelasan informasi yang disampaikan kepada peserta PKH :

“Menurut saya pendamping sudah melakukan sosialisasi dengan baik, tetapi terkadang saya kurang paham dengan informasi yang dijelaskan, karena terkadang saya tidak menghadiri pertemuan karena saya kerja. Walaupun saya sudah tua, tetapi saya masih bekerja membuat tape ubi untuk menambah keuangan keluarga saya.”

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat dilihat bahwa pelaksanaan kejelasan informasi di Desa Beringin Indah masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan kurang pahamnya peserta PKH Lansia terhadap apa yang dijelaskan oleh pendamping. Dari wawancara Ibu Sarjinh, kita tahu bahwa kegiatan yang dilakukan pendamping sesuai sub indikator kejelasan informasi yang disampaikan sasaran PKH masih belum terlaksana dengan baik karena pada kenyataannya sasaran PKH kriteria lansia tersebut tidak memahami apa yang disampaikan oleh pendamping. Hal ini juga akibat dari kesalahan sebagian peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam indikator komunikasi masih belum terlaksana dengan baik, ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan terhadap sub indikator yaitu kejelasan informasi yang disampaikan sasaran PKH. Sasaran belum mengerti mengenai apa yang disampaikan oleh pendamping.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (201098) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ialah sesuatu yang menunjuk setiap kebijakan haruslah didukung oleh sumber daya yang memadai, meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran/finansial, dan sumber daya peralatan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “mungkin sumber daya yang paling penting dalam menerapkan kebijakan adalah staf”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* yaitu Ibu Saripah S.K.M sebagai pendamping PKH di Desa Beringin Indah, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 09.30 WIB mengenai bagaimana staf/ tim pelaksana dalam menjalankan PKH di Desa Beringin Indah, apakah jumlahnya memadai berpengalaman, dan terampil pada bidangnya, Ibu Saripah menjawab :

“Untuk jumlah pendamping sebenarnya kurang. Kami pendamping di kecamatan Pangkalan Kuras satu orang pendamping mengurus tiga desa sekaligus. Hal ini membuat saya agak kewalahan dalam melakukan tugas saya. Apalagi Desa Beringin Indah ini merupakan desa yang paling jauh dari tempat tinggal saya. Namun, saya tetap melaksanakan tugas saya dengan maksimal, agar tercapainya tujuan dari PKH itu sendiri.”

Berdasarkan wawancara dengan *key informan* di atas, diperoleh informasi bahwa kurangnya jumlah staf pelaksana PKH di Desa Beringin Indah, namun pendamping tetap melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *informan* yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.25 mengenai bagaimana staf/ tim pelaksana dalam menjalankan PKH di Desa

Beringin Indah, apakah jumlahnya memadai, berpengalaman, dan terampil pada bidangnya, Ibu Sulasmi Nur menjawab :

“Menurut saya jumlah pelaksana nya masih kurang, pendamping di Desa Beringin Indah harus mengurus dua desa lainnya secara bersamaan. Namun, hal itu tidak berpengaruh terhadap kinerja beliau. Beliau tetap melaksanakan semua tugasnya dengan sungguh-sungguh.”

Dari tanggapan informan diatas dapat peneliti lihat bahwa untuk jumlah staf memang kurang memadai, namun untuk keterampilannya sudah sesuai dengan bidangnya.

Dari hasil wawancara key informan dan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah dalam sub indikator sumber daya manusia masih kurang baik, hal ini dikarenakan jumlah staf pelaksana masih kurang memadai.

b. Sumber Daya Anggaran/Finansial

Edward III dalam Widodo (2010100) menyatakan dalam kesimpulan studinya terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010100) menyatakan bahwa” terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program”. Edward III dalam Widodo (2010101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* yaitu Ibu Saripah S.K.M sebagai pendamping PKH di Desa Beringin Indah, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 09.30 WIB mengenai anggaran biaya dalam proses pengimplementasian PKH di Desa Beringin Indah, Ibu Saripah menjawab :

“Untuk masalah biaya dalam mengimplementasikan PKH sudah ada dari gaji saya. Jadi tidak ada masalah dalam hal keuangan karena ini juga memang menjadi tanggung jawab dalam pekerjaan saya. Namun, untuk dana bantuan PKH sering terjadinya keterlambatan cair dana PKH, hal ini tentunya membuat program ini berjalan kurang maksimal.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *informan* yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.25 mengenai anggaran biaya dalam proses pengimplementasian PKH di Desa Beringin Indah, Ibu Sulasmi menjawab :

“Kalau saya sebagai pengawas, kan dipilih oleh masyarakat sini, jadi saya tidak mendapat anggaran. Saya dipilih sebagai pengawas hanya untuk membantu meringankan tugas pendamping. Namun, terkadang pendamping memberi saya sedikit gajinya.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH kriteria Lansia di Desa Beringin Indah, Ibu Yatin pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 14.33 WIB mengenai dana PKH di Desa Beringin Indah, Ibu Yatin menjawab :

“Untuk bantuan dana, kadang kala sering terjadi keterlambatan. Terkadang juga, ada yang sudah cair namun ada juga yang belum cair dana nya. Jadi kami khawatir jika bantuannya tidak cair. Kami sebagai penerima bantuan, hanya bisa menunggu.”

Berdasarkan hasil wawancara *key informan* dan *informan* diatas, peneliti melihat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah

pada sub indikator sumber daya anggaran/finansial berjalan kurang baik. Hal ini dapat dilihat masih adanya kendala keterlambatan cair nya dana bantuan PKH.

c. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : implementasi fisik juga dapat menjadi hal penting dalam implementasi. Pelaksana mungkin memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa bangunan, peralatan, perlengkapan, dan bahkan ruang terbuka hijau yang diperlukan, implementasi tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *key informan* yaitu Ibu Saripah S.K.M sebagai pendamping PKH di Desa Beringin Indah, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 09.30 WIB mengenai bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pendampingan di Desa Beringin Indah, Ibu Saripah S.K.M menjawab :

“Untuk fasilitasnya ditanggung oleh pemerintah, seperti tenaga kesehatan, pendidikan, pemberian ATM untuk masing-masing peserta untuk pencairan dana, pemberian makanan pokok setiap satu bulan sekali, dan segala sesuatu keperluan pelaksanaan PKH itu sudah ditanggung. Jadi, saya hanya tinggal menjalankan tugas saya saja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *key informan* yaitu Ibu Saripah S.K.M sebagai pendamping PKH di Desa Beringin

Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada sub indikator sumber daya peralatan yaitu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan informan mengenai sub indikator sumber daya peralatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH kriteria Lansia di Desa Beringin Indah, Ibu Katini pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 15.25 WIB mengenai fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pendampingan di Desa Beringin Indah, Ibu Sulasmi menjawab :

“untuk fasilitas ditanggung dengan pemerintah, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, posyandu lansia dan balita, pemberian makanan bergizi, itu semua ditanggung pemerintah. Kami sebagai peserta hanya tinggal menjalani saja”

Dari tanggapan informan diatas, dapat diperoleh informasi bahwa semua fasilitas sudah ditanggung pemerintah, hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH pada sub indikator sumber daya peralatan sudah berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara key informan dan informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah belum berjalan baik sepenuhnya. Masih ada terjadinya kendala seperti kurangnya jumlah staf pelaksana, sering terjadinya keterlambatan cairnya dana PKH.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh sungguh sehingga

apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *key informan* yaitu Ibu Saripah S.K.M sebagai pendamping PKH di Desa Beringin Indah, pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 09.30 WIB mengenai Bagaimana pemahaman Ibu mengenai tugas Ibu dalam menjalankan kegiatan dan penyaluran dana PKH? Apakah ada hal yang Ibu tidak mengerti , Ibu Saripah S.K.M menjawab :

”Untuk menjadi seorang pendamping PKH itu tidak sembarangan dipilih. Untuk menjadi pendamping kami melewati beberapa tahapan dan seleksi yang diadakan oleh kementerian sosial. Jadi sudah seharusnya kami paham dengan tugas yang kami jalankan. Begitu juga dengan saya, sebagai seorang pendamping PKH , saya tentunya paham apa saja yang sudah menjadi tugas saya karena sebelum terjun langsung kelapangan, saya sudah mendapatkan pelatihan pendampingan sosial PKH. Jadi, untuk mengenai tugas dan kewajiban saya sudah paham dan mengerti semuanya.”

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan yaitu Bagaimana sikap Ibu dalam menjalankan PKH dan bagaimana cara Ibu dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi, Ibu Saripah S.K.M menjawab :

”Sebagai seorang pendamping sosial PKH pastinya harus memiliki sikap yang sabar dan telaten ya, apalagi yang dihadapi rata-rata ibu-ibu dan lansia, jadi harus banyak-banyak sabar dan tentu nya tetap tegas jika ada yang melanggar kewajibannya sebagai peserta penerima PKH, misal tidak

pernah hadir dalam pertemuan bulanan, harus ditindaki cepat agar masalah nya cepat terselesaikan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *key informan* yaitu Ibu Saripah S.K.M sebagai pendamping PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada indikator disposisi yaitu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan informan mengenai sub indikator sikap dan pemahaman pelaksana. Hal ini dibuktikan dengan pemahaman pendamping mengenai tugasnya serta sikapnya yang sabar dan telaten, hal ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan PKH di Desa Beringin Indah karena jika pelaksana nya tidak paham mengenai tugas dan tanggung jawabnya, maka program tersebut tidak akan berjalan dengan lancar, bahkan bisa melenceng dari tujuannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai Pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.25 mengenai bagaimana pemahaman pendamping mengenai tugasnya dalam menjalankan kegiatan dan penyaluran dana PKH yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“Pendamping sangat memahami tugasnya dan sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Beliau sangat profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.apalagi pendamping itu dipikirkan tidak sembarangan, mereka harus ikut tes dan mendapat pelatihan, jadi beliau sudah paham apa tugas dan kewajibannya sebagai pendamping”

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan yaitu bagaimana sikap pendamping dalam menjalankan PKH dan bagaimana cara pendamping tersebut dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi, Ibu Sulasmi Nur menjawab :

“Sikap pendamping sangat ramah dan sabar dalam menjelaskan materi kepada peserta PKH, apalagi kepada peserta yang sudah lansia yang sedikit susah memahami materi yang dijelaskan oleh pendamping. Beliau juga cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang terjadi, seperti jika ada informasi penting yang sifatnya mendesak, beliau langsung menyampaikannya lewat saya, kemudian saya yang menyampaikan kepada anggota penerima PKH. Jika ada masyarakat Desa Beringin Indah yang berhak menerima bantuan PKH namun belum terdaftar protes kepada beliau, beliau selalu mengatasinya dengan tenang dan selalu mencari solusinya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai Pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada indikator disposisi yaitu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan informan mengenai sub indikator sikap pemahaman pelaksana dan PKH di Desa Beringin Indah. Pendamping sudah memiliki sikap yang baik dan ramah, dan memahami tugasnya dengan baik, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan suatu program.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta PKH lansia di Desa Beringin Indah, Ibu Ngadinem pada Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pada pukul 13.05 mengenai bagaimana pemahaman pendamping mengenai tugasnya dalam menjalankan kegiatan dan penyaluran dana PKH, Ibu Ngadinem menjawab

“Ibu Saripah ini seorang pendamping, jadi pastinya beliau paham dengan tugasnya. Beliau menjelaskan dan kami penerima PKH mendengarkan penjelasan Ibu Saripah”

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti tanyakan yaitu bagaimana sikap pendamping dalam menjalankan PKH dan bagaimana cara pendamping tersebut dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi Ibu Ngadinem menjawab :

“Sikapnya baik dan sabar, kalau ada masalah yang muncul selalu cepat menanganinya. Misalnya adanya keterlambatan pencairan dana PKH, beliau pasti menyampaikan langsung dan memberi tahu alasannya agar kami selalu sabar menunggu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *informan* yaitu Ibu Ngadinem sebagai peserta lansia PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada indikator disposisi sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peserta PKH sendiri yang mengatakan bahwa sikap pelaksana sangat baik serta pelaksana memahami tugasnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* Bapak Muh Safari sebagai Kepala Desa Beringin Indah, pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2021 pada pukul 09.45 WIB mengenai sikap pendamping dalam menjalankan PKH dan bagaimana cara pendamping tersebut dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi, Bapak Muh Safari menjawab :

“Dari yang saya lihat pendamping ini sangat tekun dan telaten dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana PKH di Desa Beringin Indah ini. Jika ada masyarakat yang memberikan pengaduan tidak mendapatkan bantuan PKH padahal layak, beliau dengan senang hati akan membantu merekomendasikan kepada Kementerian Sosial, walaupun belum tentu disetujui, tetapi paling tidak beliau tidak sungkan membantu masyarakat Desa Beringin Indah tanpa membedakan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *informan* yaitu Bapak Muh Safari sebagai Kepala Desa Beringin Indah pada indikator disposisi sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peserta PKH sendiri

yang mengatakan bahwa sikap pelaksana sangat baik serta pelaksana memahami tugasnya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam indikator disposisi sudah terlaksana dengan baik, ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan terhadap sub indikator yaitu sikap dan pemahaman pelaksana.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.

a. SOP (Standard Operasional Procedure)

Menurut Winarno (2005:150) ”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan *key informan* Ibu Saripah S.K.M pendamping PKH di Desa Beringin Indah, pada hari sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 09.30 WIB mengenai Bagaimana SOP yang ada, apakah Ibu sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan apakah SOP yang tersedia mudah dipahami, Ibu Saripah S.K.M menjawab :

“Sebuah program pastinya memiliki SOP atau Standar Operasional Prosedur. Dalam PKH Prosedur tersebut sudah disediakan sebuah buku pedoman PKH, yang isinya berupa hak-hak dan kewajiban peserta PKH, aturan-aturan, sanksi jika melanggar, kriteria peserta PKH, alur pelaksanaannya, dan sebagainya yang digunakan sebagai acuan PKH tersebut. Dan pastinya saya juga melaksanakan tugas saya sesuai dengan buku pedoman tersebut. Adanya SOP ini juga membantu memudahkan saya dalam menjalankan tugas saya karena semua tugas-tugas saya sudah ada tercantum dalam buku pedoman tersebut.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai Pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.25 mengenai Bagaimana menurut Ibu mengenai SOP yang ada, apakah pelaksana sudah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, Ibu Sulasmi Nur menjawab :

“Menurut saya pelaksana sudah menggunakan SOP PKH dalam menjalankan tugasnya. Beliau selalu membawa buku pedomsn umum PKH. Beliau juga menjelaskan hak dan kewajiban peserta, sanksi jika melanggar, dan semua informasi-informasi lain itu dari buku paduan yang selalu beliau bawa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *informan* yaitu Ibu Sulasmi Nur sebagai Pengawas PKH di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan pada indikator disposisi yaitu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan key informan mengenai sub indikator SOP, pelaksana sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

b. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar.

Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan *informan* yaitu Bapak Muh Safari sebagai Kepala Desa Beringin Indah pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 10.25 mengenai bagaimana menurut Bapak mengenai hubungan/koordinasi tim pelaksana dengan aparat desa dalam proses pelaksanaan Program tersebut, Bapak Muh Safari menjawab :

“Pastinya kami memiliki hubungan yang baik, tim pelaksana datang ke kantor desa untuk menyampaikan perkembangan Program PKH tersebut kepada pihak desa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *informan* yaitu Bapak Muh safari sebagai Kepala Desa Beringin Indah pada indikator disposisi yaitu sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan *informan* mengenai sub indikator hubungan/koordinasi, pelaksana selalu menyampaikan perkembangan program PKH dengan pihak desa.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program keluarga Harapan Di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam indikator struktur birokrasi sudah terlaksana dengan baik, ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan key *informan* dan *informan* terhadap sub indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi (hubungan kerja).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 terlaksana

cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat di atas bahwa pelaksana PKH di Desa Beringin Indah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun masih adanya sedikit kekurangan yang masih bisa diperbaiki.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020

Temuan dalam penelitian ini diketahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah yaitu :

1. Hambatan yang terjadi pada indikator komunikasi, peneliti temukan pada penelitian ini terjadi pada indikator komunikasi, yang mana masih kurangnya kesadaran dari sebagian keluarga penerima manfaat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai peserta PKH. Contohnya tidak menghadiri pertemuan bulanan yang rutin diadakan. Padahal pertemuan bulanan ini merupakan kewajiban peserta dalam PKH. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan seperti kurang mendapat informasi sehingga membuat pendamping harus menjelaskan ulang materi yang telah disampaikan. Kurang jelasnya pendamping dalam menjelaskan materi kepada kelompok lansia juga membuat komunikasi menjadi kurang baik
2. Kurangnya staf pelaksana dalam pelaksanaan PKH di Desa Beringin Indah pada sub indikator sumber daya manusia. Hal ini bisa menyebabkan kurang fokusnya pendamping dalam mengurus peserta PKH. Pada sumberdaya anggaran pun masih terdapat kendala, yaitu sering terjadinya keterlambatan

cairnya dana bantuan PKH. Hal ini tentunya membuat pelaksanaan program menjadi terhambat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020, maka dapat peneliti simpulkan berdasarkan teori di dalam penelitian ini, Hasil penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 secara keseluruhan sudah cukup terlaksana baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator implementasi dalam penelitian yang ditinjau dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pelaksana PKH di Desa Beringin Indah sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai SOP yang ada. Masyarakat juga sudah melaksanakan kewajibannya walaupun ada beberapa dari peserta PKH yang tidak memenuhi kewajiban mereka.

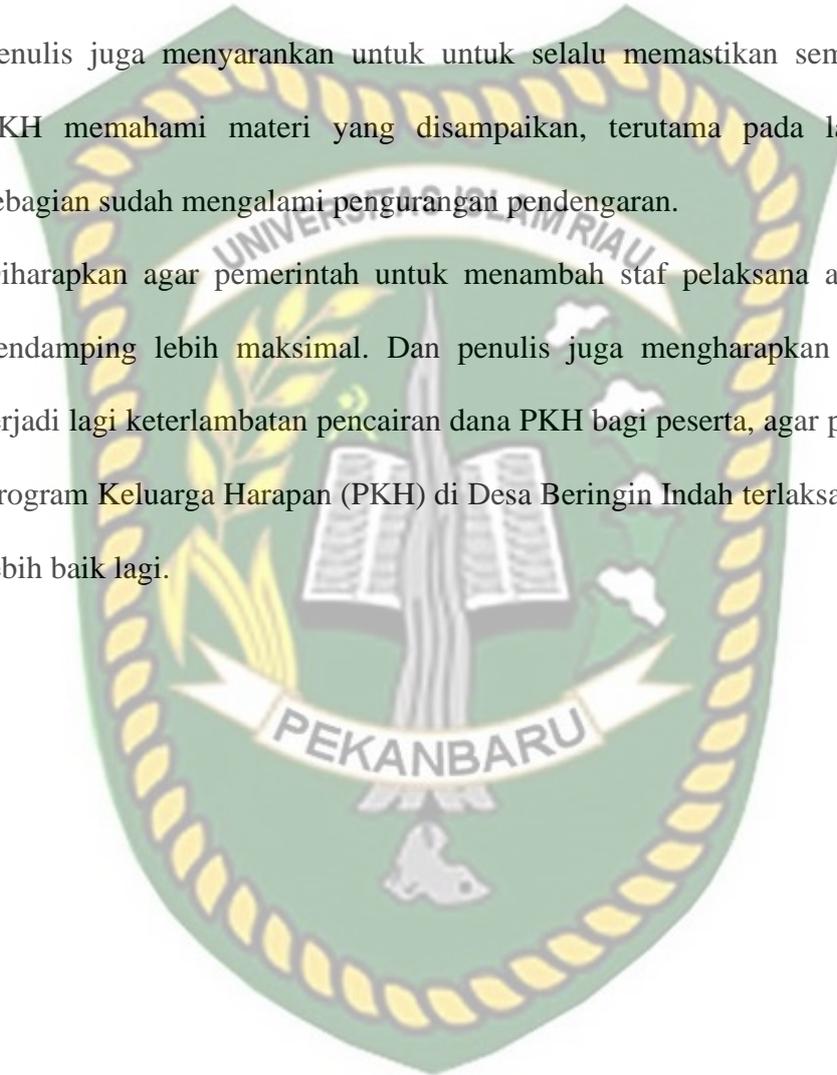
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti memberi saran sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan untuk peserta PKH yang malas untuk menghadiri pertemuan bulanan, agar menghadiri pertemuan tersebut karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi peserta PKH.

Karena jika dilakukan terus menerus, maka bisa mendapat sanksi dikeluarkan dari daftar peserta PKH.

2. Untuk pelaksana PKH, yaitu pendamping PKH di Desa Beringin Indah, Penulis juga menyarankan untuk untuk selalu memastikan semua peserta PKH memahami materi yang disampaikan, terutama pada lansia yang sebagian sudah mengalami pengurangan pendengaran.
3. Diharapkan agar pemerintah untuk menambah staf pelaksana agar kinerja pendamping lebih maksimal. Dan penulis juga mengharapkan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan dana PKH bagi peserta, agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Beringin Indah terlaksana menjadi lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- . 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktek*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Labobo, Muhadam. 2011. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta.

—. 1997. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Ndraha, Talizuhu. 2002. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta.

Rauf, Rahyunir. 2018. *Azas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Nusamedia.

Sugiyono. 2016. *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Syafii, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI & Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.

Tangkisilan, Hessel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta : Lukman Offset & YPAPI.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan studi Kasus : edisi dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta : CAPS.

—. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Press.

Jurnal :

Ardianti, Eni. 2017. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang.

Hidayat, Syarif. 2018. Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH): Meliputi Partisipasi, Pemberdayaan, Dan Kinerja Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pulau Pangung.

Janah, A. N. 2019. Optimalisasi Layanan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lansia Di Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

Purwanto, S. A., Sumartono, & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).

Rismana, Daud. 2019. Implementasi Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH). *Al'Adl, Volume XI Nomor 2*, 138.

Sani, A., & Dewi, U. (n.d.). Kinerja Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Dalam Optimalisasi Program Keluarga Harapan Di Kota Yogyakarta.

Suwinta, A. E., & Prahawati, I. 2016. Implementasi Program Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Kajian Kebijakan Politik Volume 1 Nomor 1*, 1-5.

Sumber Lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerinta Daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
6. Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2016.
7. Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2020.
8. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan kertas Kerja Mahasiswa (KKM), 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau